

OPTIMALISASI EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA

I Made Marsa Arsana ¹⁾

I Nyoman Sugiarta ²⁾

Politeknik Negeri Bali ^{1), 2)}

ABSTRACT

Observation of LPD expectation can anticipate problems early possible, and return operational of LPD under the way step by step, and also motivate LPD to make enableness breakthroughs forwards. Internal Supervisor doobervation less walk maximally, procedure operational standard (Observation SOP) less adequate, professionalism still less. Related to thementioned conductedresearch of management criterion implementation effectiveness management and technique observation of LPD. Formula problem of research: what have is optimal of management implementation effectiveness management and effective observation technique of LPD? Target of research: to yield optimalisasi mount management implementation effectiveness and effective observation techniqueof LPD. Method Research, used data collecting technique that is: interview, observation and enquette. Data analysed descriptively to find effectivenessobservation. Result of research is observation of conducted LPD by applying observation technique is effective enough, and apply observation management is effective, and also TMP Rate is effective. This result a long way off from expectation that is very effective so that less optimal mount effectiveness observation of LPD.

Keyword: *Management Observation, Technique Observation, Effectiveness Observation, Village CreditInstitute.*

I. PENDAHULUAN

Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali maupun Walikota Denpasar sehubungan dengan pengawasan LPD, bertujuan untuk memantau secara berkesinambungan perkembangan LPD. Pengawasan LPD dijalankan dengan harapan mampu mengantisipasi permasalahan sedini mungkin dan mengembalikan operasional-operasional LPD yang kurang sehat secara bertahap serta tim pengawas eksternal dapat memotivasi LPD untuk membuat terobosan-terobosan pemberdayaan ke depan. Hal ini senada dengan (Prasta, 2016) bahwa, untuk memperkuat perekonomian pedesaan ini, LPD perlu adanya auditor kompeten agar

pengelolaannya lebih transparan dan kinerja LPD lebih meningkat.

Berdasarkan survei pendahuluan menunjukkan pengawas internal LPD mempunyai bentuk pengawasan dan perilaku masih kurang maksimal. Hal ini diungkapkan oleh beberapa orang sebagai kepala LPD Desa Pakraman Kedua, bahwa badan pengawas internal melakukan dua bentuk pengawasan yaitu pelaksanaan pengawasan langsung setiap satu bulan sekali dan pengawasan secara tidak langsung dimana pengurus LPD mengirim laporan neraca, laba rugi setiap minggu. Berbeda dengan penjelasan kepala LPD Desa Pakraman Penatih Puri bentuk

pengawasan hanya pengawasan langsung setiap satu bulan sekali, berbeda juga dengan penjelasan kepala LPD Desa Pakraman Sumerta bentuk pengawasan hanya pengawasan langsung setiap tiga bulan sekali pada tahun yang bersangkutan.

Tugiman (2006) mengatakan bahwa, keberhasilan dalam pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas yang meliputi: pengetahuan yang tinggi, sikap yang positif dan ketrampilan yang tinggi dalam menerapkan teknologi, kreativitas dan keinovatipan yang berkaitan dengan usaha pengawas internal yang efektif. Hal tersebut didukung oleh Desyanti dan Ratnadi (2008) yang secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengawasan sangat dipengaruhi oleh sikap independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja pengawasan internal. Hasil tersebut juga didukung Dicriyani dan Arsana (2014) bahwa faktor sikap independensi berpengaruh signifikan positif meningkatkan efektivitas audit intern pada LPD; faktor kemampuan profesional berpengaruh signifikan positif meningkatkan efektivitas audit intern pada LPD.

Hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan efektivitas menghasilkan efektivitas pengawasan LPD yang berbeda dan masih banyak dibawah sangat efektif Wedayani, dan Jati (2012) menghasilkan 86,27% sangat efektif fungsi pengawasannya, Dewi dan Yasa (2012) menghasilkan 63,89% sangat efektif fungsi pengawasannya, dan Giri *et al.* (2014) menghasilkan 35,29% sangat efektif fungsi pengawasannya. Berkaitan dengan

pelaksanaan pengawas oleh badan pengawas internal dan pengawas eksternal belum berjalan secara maksimal, ketidakpastian tugas pokok dan fungsi pengawas eksternal LPD (Agustini, 2013). Mertha dan Budiarta (2009) menjelaskan Bendesa Adat karena jabatannya, secara *ex officio* menjabat sebagai ketua badan pengawas sehingga dituntut untuk memahami dan mengetahui secara utuh operasional LPD dan tingkat kemajuan yang dicapai. Dalam kenyataannya, tidak semua bendesa adat memahami secara utuh operasional LPD, karena umumnya bendesa adat yang dipilih oleh paruman desa adat adalah orang-orang yang kharismatik, berwibawa, dan hanya memiliki wawasan tentang agama.

Ramantha (2006) mengatakan, bahwa 1.304 orang Bendesa Adat di Bali mengenai fungsi manajemen LPD dibidang pengawas terjadi kesenjangan dalam pemahaman tentang neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan keuangan komparatif, struktur modal, aktiva produktif, likuiditas, rentabilitas, dan manajemen risiko. Kondisi kesenjangan ini mendesak untuk adanya revitalisasi LPD.

Untuk mencapai pengawasan yang efektif harus implementasikan kriteriamanajemen dan teknik pengawasan efektif (Handoko, 2003, Harahap, 2001). Terkait dengan hal tersebut dilakukan penelitian tingkat efektivitas implementasi kriteria manajemen dan teknik pengawasan LPD. Rumusan masalah penelitian: Apakah sudah optimal tingkat efektivitas implementasi manajemen dan teknik pengawasan efektif LPD? Tujuan penelitian: untuk menghasilkan optimalisasi tingkat

efektivitas implementasi manajemen dan teknik pengawasan efektif LPD.

III. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, angket dan observasi. Analisis Data, data kualitatif sebelum dianalisis diubah menjadi data kuantitatif dalam bentuk skala. Setiap variabel dibuat menjadi lima katagori berdasarkan skala likert. Skor rata-rata skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala lima yaitu Sangat Tidak Setuju bobot nilai 1, Tidak Setuju bobot nilai 2, Cukup bobot nilai 3, Setuju bobot nilai 4, Sangat setuju bobot nilai 5. Nilai skor rata-rata (Rs) diperoleh melalui perhitungan adalah sebesar 0,8. Perhitungan tersebut didapat melalui rumus berikut: $Rs = R \text{ (bobot)} / M$, Dimana: R (bobot) = bobot terbesar-bobot terkecil, M = banyaknya

kategori bobot. Perhitungan skor rata-rata untuk skala lima atau skala likert adalah sebagai berikut: $Rs = (5 - 1) / 5 = 0,8$. Skor rata-rata tersebut digunakan ke dalam rentang skala keputusan. Data dianalisis secara deskriptif (Balck dan Champion, 1999) untuk menemukan tingkat efektivitas pengawasan.

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik pengawasan, Manajemen pengawasan (TMP) model untuk mengetahui efektifitas pengawasan LPD di Kota Denpasar.

Dimensi teknik pengawasan data yang berhasil dikumpulkan diolah ke dalam analisis tabulasi sederhana seperti disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Dimensi Teknik Pengawasan

Atribut	Bobot	Responden						X1	X2	X3	X4	X5	X6
		ML	SM	PL	PF	PK	MB						
STS	1	0	47	20	5	32	0	0	47	20	5	32	0
TS	2	1	28	6	16	48	4	2	56	12	32	96	8
CS	3	15	25	25	67	24	24	45	75	75	201	72	72
S	4	67	18	62	5	24	71	268	72	248	20	96	284
SS	5	45	10	15	35	0	29	225	50	75	175	0	145
Total		128	128	128	128	128	128	540	300	430	433	296	509

Sumber: Hasil survei (data diolah)

Keterangan:

ML=Melalui sistem Laporan, SM=Secara Mendadak, PL=Pengawasan langsung, PF=Pengawasan fisik, PK=Pengawasan khusus, MB=Melalui Budget

Berdasarkan hasil tabulasi rata-rata dimensi teknik pengawasan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Px T1)} &= 540 / 128 = 4,22 \\
 \text{Px T2)} &= 300 / 128 = 2,34 \\
 \text{Px T3)} &= 430 / 128 = 3,36 \\
 \text{Px T4)} &= 433 / 128 = 3,38 \\
 \text{Px T5)} &= 296 / 128 = 2,31 \\
 \text{Px T6)} &= 509 / 128 = 3,98
 \end{aligned}$$

IIIX Teknik Pengawasan = 3,27

Nilai X dimensi teknik pengawasan yang dihasilkan adalah sebesar 3,27. Nilai ini berada dalam rentang skala keputusan 2,6 sampai dengan 3,4, dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Skala Keputusan TMP Model

Kriteria	Rentang Skala
Sangat Tidak Efektif	1,0 – 1,8
Tidak Efektif	1,8 – 2,6
Cukup Efektif	2,6 – 3,4
Efektif	3,4 – 4,2
Sangat Efektif	4,2 – 5,0

Sumber: hasil pengolahan.

Dengan demikian dapat dikatakan pengawasan LPD yang dilakukan dengan menerapkan teknik pengawasan adalah cukup efektif.

Dimensi manajemen pengawasan data yang berhasil dikumpulkan diolah kedalam analisis tabulasi sederhana seperti disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Dimensi Manajemen Pengawasan

Atribut	Bobot	Responden					X1	X2	X3	X4	X5
		PSP	PPK	PPKN	PPKS	PTK					
STS	1	16	2	1	0	0	16	2	1	0	0
TS	2	7	4	6	4	5	14	8	12	8	60
CS	3	23	23	21	31	23	69	69	63	93	69
S	4	60	54	54	51	53	240	216	216	204	212
SS	5	22	45	46	42	22	110	225	230	210	110
Total		128	128	128	128	128	449	520	522	515	451

Sumber: Hasil survei (data diolah)

Keterangan:

PSP=Penetapan standar pelaksanaan, PPK=Penentuan pengukuran kegiatan, PPKN=Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, PPKS=Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, PTK=Pengambilan tindakan koreksi

Hasil tabulasi Tabel 1.3 kemudian ditentukan rata-rata respon dimensi manajemen pengawasan yaitu, sebagai berikut:

$$\text{PIX (M1)} = 449 / 128 = 3,51$$

$$\text{PIX (M2)} = 520 / 128 = 4,06$$

$$\text{PIX (M3)} = 522 / 128 = 4,08$$

$$\text{PIX (M4)} = 515 / 128 = 4,02$$

$$\text{PIX (M5)} = 451 / 128 = 3,52$$

$$\text{PIx (Manajemen Pengawasan)} = 3,84$$

Nilai x dimensi manajemen pengawasan yang dihasilkan adalah sebesar 3,84. Nilai ini berada dalam rentang skala keputusan 3,4 sampai dengan 4,2 dapat dilihat dalam Tabel 1.2, maka dapat dikatakan pengawasan LPD yang dilakukan dengan menerapkan manajemen pengawasan adalah efektif.

TMP *Rate*, unsur pengawasan efektif dari segi dimensi teknik dan manajemen pengawasan, kedua unsur tersebut dirata-ratakan sebagai berikut:

$$\text{TMP Rate} = (\text{nilai } x \text{ teknik pengawasan} + \text{nilai } x \text{ manajemen pengawasan})/2 = 3,27 + 3,84/2 = 3,55.$$
Nilai TMP *Rate* yang diperoleh adalah sebesar 3,55. Nilai ini berada dalam rentang skala 3,4 sampai 4,2 yang berarti efektif.

Kondisi empiris cukup efektif mengimplementasikan teknik pengawasan dan efektif mengimplementasikan manajemen pengawasan serta TMP adalah efektif, hasil ini masih jauh dari harapan yakni sangat efektif yang berada dalam rentang skala 4,2 sampai 5,0.

Empiris ini disebabkan masih kurang profesionalnya pengawas internal dalam melakukan pengawasan mengimplementasikan teknik pengawasan dalam hal ML = Melalui sistem Laporan, SM = Secara Mendadak, PL = Pengawasan langsung, PF = Pengawasan fisik, PK = Pengawasan khusus, MB = Melalui Budget; terutama implementasi teknik pengawasan secara mendadak dan pengawasan khusus.

Pengawasan secara mendadak keuangan misalnya pemeriksaan kas dengan cara mendadak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas, terlebih dahulu ambil buku kas, tanyakan apakah ada penerimaan dan pengeluaran yang

belum dibukukan, jika sudah, tutup buku kas umum, minta neraca percobaan dan hitung uang kas, dapat hitung dengan cara dihitung oleh kasir disaksikan oleh pengawas, dihitung oleh pengawas disaksikan oleh kasir atau dihitung bersama-sama. Setelah itu dirinci permata uang yang sama untuk mengisi lembaran berita acara pemeriksaan kas. Apabila terjadi perbedaan tanyakan sebab perbedaan dan telusuri sampai ketemu. Bukti-bukti mutasi baik pada sisi penerimaan maupun pada sisi pengeluaran diteliti ulang dan dijumlah kembali dan *cross cek* dengan akunnya serta lakukan tindakan koreksi/ penyesuaian bila perlu.

Pengawasan khusus, sasaran pengawasan kurang terpusat pada poin-poin pengawasan strategik, artinya sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kegagalan paling fatal.

Badan pengawas dalam mengimplementasikan manajemen pengawasan masih kurang profesionalnya dalam hal: PSP = Penetapan standar pelaksanaan, PPK = Penentuan pengukuran kegiatan, PPKN = Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, PPKS = Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, PTK = Pengambilan tindakan koreksi, terutama implementasi manajemen pengawasan penetapan standar pelaksanaan dan pengambilan tindakan koreksi.

Penetapan standar pelaksanaan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil kurang fokus antara lain: a) standar-standar fisik meliputi kuantitas jasa, jumlah langganan atau kualitas jasa, b) standar-standar

moneter meliputi biaya tenaga kerja, biaya operasional, laba kotor, pendapatan operasional, dan sebagainya, c) standar-standar waktu meliputi kecepatan pelayanan atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

Pengambilan tindakan koreksi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal belum menjelaskan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pimpinan objek yang diawasi tanggap terhadap hasil pengawasandan seberapa jauh langkah-langkah yang telah diambil. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah, yaitu: menemukan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah timbulnya masalah yang serupa.

Disamping kurang profesionalnya juga kurang fokus dalam melakukan pengawasan disebabkan karena badan pengawas internal LPD tidak hanya memegang satu peranan sebagai pengawas, di sisi lain mereka juga bekerja di instansi lain. Sejalan dengan hasil penelitian Ramantha (2015) bahwa, pekerjaan badan pengawas sebagai tugas sampingan (pengabdian).

Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang dijadikan acuan badan pengawas dalam menjalankan tugasnya agar berkelanjutan. Hal ini juga diungkap dalam hasil penelitian Desyanti dan Ratnadi, 2008, Putra dan Wisadha, 2012.

Penelitian Wedayani dan Jati (2012) tingkat efektivitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap

pemberian kredit telah dilaksanakan secara efektif dan sisanya sebanyak 7 LPD atau 13,73% tingkat efektivitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap pemberian kredit dilaksanakan secara kurang efektif. Belum efektifnya badan pengawas disebabkan masih kurang mengetahui fungsi pemeriksaan dan kemampuan teknisnya dalam melaksanakan audit bidang perbankan/LPD, pengalaman auditor (Putra & Wisadha 2012). Senada dengan Mahardika, 2010, Dewi & Suryanawa, 2015 yang meneliti tentang efektifitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap pemberian kredit pada LPD di Kota Denpasar.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan pengawasan LPD yang dilakukan dengan menerapkan teknik pengawasan adalah cukup efektif, dan menerapkan manajemen pengawasan adalah efektif, serta TMP Rate adalah efektif. Hasil ini masih jauh dari harapan yakni sangat efektif sehingga kurang optimal tingkat efektivitas pengawasan LPD

Terkait dengan simpulan kurang optimal tingkat efektivitas dapat disarankan pengawas sebaiknya melakukan teknik pengawasan secara mendadak dan pengawasan khusus pada poin-poin pengawasan strategik, implementasi manajemen pengawasan penetapan standar pelaksanaan, pengambilan tindakan koreksi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta adanya standar operasional prosedur (SOP) pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini. 2013. Pengawasan Pemberian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD Di Kota Denpasar. *Tesis*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Balck, J.A., dan Champion, D.J.1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Desyanti, E. Ni Pt., dan Ratnadi, D. Ni Md. 2008. Pengaruh independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja pengawas intern terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. (03) 01. h: 34-44.
- Dewi, I. I. N. M., dan Yasa G.W. 2014. Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Dalam Menekan Kredit Macet Pada LPD se-Kabupaten Buleleng *e-journal*. jpakuntansidd120251.
- Dewi,M. D. K. dan Suryanawa I. K.2015.Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Profesi Nasabah Kredit, Efektivitas Badan Pengawas Pada Non Performing Loan.*E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana Vol.13.3 Desember 2015: 779-795ISSN: 2303-1018
- Dicriyani, M. N. L.G., dan Arsana, M. I Md. 2014. Determinasi Independen, Kemampuan Profesional, dan Ruang Lingkup Audit Intern Terhadap Efektivitas Audit Intern Pada LPD Binaan PLPDK Mengwi. *Jurnal Manajemen & Akuntansi*. Vol 20 No. 1. Juni 2014
- Giri, T. A. N. L.G., Zukhri A., dan Meitriana A.M. 2014. Efektivitas Fungsi Pengawas sebagai Internal Auditor Dalam Pengawasan Operasional LPD se-Kecamatan Pupuan. *e-journal*. Undiksha. Vol.4 No.1 Tahun 2014
- Handoko, T. H. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapan belas. BPFE Yogyakarta
- Harahap. S. S. 2011. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Mahardika.2010, Efektifitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap pemberian kredit pada LPD di Kota Denpasar.
- Mertha dan Budiarttha. 2009. Profesionalisme Badan Pengawas Mendorong Kemajuan LPD. *Buletin.Studi Ekonomi*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012.

[hp/jja/artikel/download/324/279](http://jja/artikel/download/324/279)

Prasta, I Nyoman Giri. Lembaga Perkreditan Rakyat Didorong Transparan & Akuntabel. *Bisnis.com*. Rabu 16/11/2016. diunduh tgl 10 Pebruari 2017

Putra, D. A. I. G. dan Wisadha, S.I. G. 2012. Pengaruh Profesionalisme, Independensi, dan Pengalaman Auditor pada Kualitas Audit Badan Pengawas LPD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2, Juli 2013

Ramantha, I. W. 2006. LPD dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Bali Post*, 15/12

Ramantha I W. 2015. Menuju Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Yang Lebih Sehat: Suatu Kajian Struktur Pengendalian Intern. www.unud.ac.id, karyacipta 148. 22 Mei 2015. Diunduh 11 Mei 2017.

Tugiman, H. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta. Kanisius.

Wedayani, N. W. dan Jati, I. K. 2012. Efektivitas Fungsi Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor dalam Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada LPD di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, dan Manggis Kabupaten Karangasem. Provinsi Bali. *e-journal.Undiksha.ac.id/index.p*